



ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK MELALUI KONFLIK ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI INDONESIA

Amalia Assyifa Rahman, Ichsan Malik, Djayeng Tirto

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Abstrak

Konflik di Papua Barat bukanlah konflik yang baru terjadi untuk ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena para penduduk Papua Barat merasa dipaksa supaya dapat bergabung dengan Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuklah Gerakan politik militer yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena ketidakpuasan yang dirasakan penduduk Papua Barat dari hasil referendum. Pada tahun 1971, OPM mulai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat disertai dengan penggunaan simbol- simbol nasionalis dan pengapdosian konstitusi. Hanya saja peningkatan militer Indonesia di wilayah perbatasan Papua Barat menyebabkan terjadinya banyak bentrokan yang telah terjadi antara OPM dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis manajemen konflik serta kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan literature review. Kajian eori yang digunakan oleh penulis yaitu teori manajemen konflik. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Manajemen konflik OPM di tanah papua ditangani secara berbeda- beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek lainnya.

Kata Kunci: Organisasi Papua Merdeka (OPM), Separatisme, manajemen konflik, operasi militer..

PENDAHULUAN

Konflik di Papua Barat bukanlah konflik yang baru terjadi untuk ditangani

oleh pemerintah. Konflik tersebut sudah terjadi sejak zaman dahulu yaitu zaman Hindia Belanda. Konflik dimulai setelah

*Correspondence Address : assyifa791@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.803-812

© 2023UM-Tapsel Press

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Papua Barat wilayah Indonesia. Hanya saja, hanya Belanda yang tidak menerimanya karena menurut pendapatnya dari sudut pandang itu Orang Papua Barat memiliki ras dan etnis yang berbeda dari kebanyakan orang Indonesia. Belanda menganggap Papua Barat sebagai provinsi Kerajaan Belanda. Sejak itu, Belanda dan Indonesia mulai memperebutkan Papua Barat hingga Tahun 1960-an (Solomat, 2015).

Hanya saja pada tahun 1969, terjadi sebuah referendum untuk menentukan penduduk Papua Barat ingin masuk ke Indonesia atau tidak. Dari hasil referendum tersebut memutuskan untuk menjadikan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Namun hasil dari keputusan tersebut dianggap beberapa penduduk Papua Barat bahwa keputusan tersebut tidak mewakili dari keinginan penduduk Papua Barat secara menyeluruh. Para penduduk Papua Barat yang merasa keberatan akan hasil referendum tersebut melesetkan referendum tersebut dari "act of free choice" menjadi "act of no choice". Hal tersebut terjadi karena para penduduk Papua Barat merasa dipaksa menggunakan ancaman kekerasan militer supaya dapat bergabung dengan Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuklah Gerakan politik militer yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena ketidakpuasan yang dirasakan penduduk Papua Barat dari hasil referendum tersebut (Aulia Widadio & Nazarudin Latief, 2019).

Pada tahun 1971, Organisasi Papua Merdeka (OPM) mulai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat disertai dengan penggunaan simbol-simbol nasionalis dan pengapdosian konstitusi. Dibalik adanya Gerakan tersebut terdapat dua tokoh penting, yaitu Jacob Prai yang merupakan lulusan dari Universitas

Cendrawasih yang sudah sejak dulu sudah anti Indonesia dan Seth Rumkorem yang merupakan mantan militer yang pada awalnya sempat pro Indonesia. Tidak lama setelah deklarasi tersebut, OPM mulai mendapatkan dukungan dari rakyat Papua hingga dukungan tersebut sampai didapatkan dari luar negeri. Saat kegiatan militer mulai meningkat pada akhir tahun 1970 hingga awal 1980-an, para pemimpin OPM mulai melarikan diri ke luar negeri. Sejak itu, kepemimpinan OPM hanya dijalankan sebatas secara territorial dan kerap kali gagal untuk disentralisasi. Kemudian muncullah sosok Kelly Kwalik pada tahun 1980-an yang berperan sebagai tokoh penting pada lingkaran OPM yang memiliki kuasa akan wilayah operasi di Kawasan tambang freeport di Timika. Hanya saja pada tahun 2009, Kelly tewas akibat tertembak yang menyebabkan munculnya sosok Goliat Tambuni yang sedang memimpin Gerakan bersenjata di Kawasan Puncak Jaya yang akhirnya meluas hingga ke distrik lain. Pengaruh kuat yang telah diberikan oleh Goliat, membuat Goliat mendapatkan jabatan panglima tertinggi di OPM pada tahun 2012 dan menjadikan Goliat sebagai tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog hingga era Jokowi (PinterPolitik S13, 2020).

Peningkatan militer Indonesia di wilayah perbatasan Papua Barat menyebabkan terjadinya banyak bentrokan yang telah terjadi antara OPM dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada sepanjang tahun 2019 banyak terjadi kekerasan bersenjata antara OPM dan TNI yang pada tujuan awalnya untuk misi perdamaian, malah menimbulkan banyak korban jiwa yang Sebagian besar berasal dari masyarakat sipil hingga mengungsinya para masyarakat Nduga. Pengungsian tersebut terjadi akibat operasi aparat gabungan dari TNI dan Polri dengan jangka waktu yang Panjang. Pengungsian tersebut dilakukan untuk menghindari

menjadi korban dari kekerasan maupun tembakan. Kemudian pada bulan maret 2020 di Kawasan pertambangan freeport terjadi baku tembak. Salah satu korban luka tembak dari konflik antara TNI dengan OPM adalah seorang pendeta di Inta Jaya pada akhir tahun 2020. Dari kasus-kasus yang telah penulis sebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara Aparat negara yaitu TNI dan Polri dengan OPM masih terjadi dan tidak pernah mereda. Tidak hanya para aktif konflik yang banyak menjadi korban jiwa, tetapi masyarakat sipil pun banyak yang telah merenggang nyawanya akibat konflik tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis mengambil dua rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini, antara lain:

1. Bagaimana manajemen konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM)?
2. Bagaimana kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM)?

LANDASAN TEORI

Pada analisis ini, penulis membahas mengenai manajemen konflik yang akan diawali dengan pengertian dan tipe manajemen konflik oleh beberapa tokoh, kemudian mengenai separatism dari pengertian dan penyebab terjadinya separatism. Setelah itu kekerasan bersenjata dan operasi militer. Pembahasan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Konflik

a. Pengertian manajemen konflik

Menurut Howard Ross, manajemen konflik merupakan tindakan yang diambil oleh aktor atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan ke hasil tertentu yang mungkin atau mungkin

tidak mengarah pada penyelesaian konflik dan mungkin atau mungkin tidak menghasilkan perilaku damai, positif, kreatif, konsensual atau agresif. Sedangkan menurut Minnery, manajemen konflik merupakan proses sastra yang rasional dimana proses itu terjadi terus menerus dan menyempurnakan dirinya sendiri hingga tercapai model yang ideal dan representatif (Tommy, 2020).

b. Tipe manajemen konflik

Terdapat enam tipe manajemen konflik menurut Dawn M. Baskerville, yaitu menghindari konflik dengan cara menjauhi pemicu konflik (Avoiding), mengumpulkan banyak pendapat dari pihak yang terlibat (Accomodating), menyelesaikan konflik dengan bernegosiasi (Compromissing), menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk untuk memenangkan kepentingan masing-masing (Competing), menyelesaikan konflik dengan bekerjasama antar semua pihak (Collaborating), dan menyelesaikan konflik dengan mengkombinasi lima tipe manajemen konflik (Conglomeration) (Tommy, 2020).

2. Separatism

a. Pengertian separatism

Separatism menurut KBBI memiliki arti Gerakan atau paham untuk memisahkan diri. Sedangkan menurut Abdul Qodir Djaelani, separatism merupakan gerakan pengacau dan destruktif yang dilakukan oleh sekelompok pengacau yang tujuannya untuk melepaskan diri dari ikatan negara (Aini, 2023).

b. Penyebab terjadinya separatism

Terdapat enam penyebab terjadinya separatism, yaitu krisis ekonomi, krisis politik, kebijakan pemerintah tak berpihak pada rakyat,

krisis sosial, hukum yang tidak dihormati, dan intervensi internasional (Fatimah, 2019).

3. Kekerasan bersenjata

Kekerasan bersenjata merupakan kekerasan yang menggunakan senjata api. Kekerasan bersenjata termasuk dalam perbuatan tindak pidana. Dampak dari kekerasan bersenjata biasanya banyak menimbulkan korban yang tidak bersalah berjatuh.

4. Operasi Militer

Tentara Nasional Indonesia sebagai Alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keamanan melakukan operasi militer dan berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Operasi militer dibagi menjadi 2 (dua) operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia).

Pelaksanaan tugas pokok TNI didasarkan pada kebijakan negara dan keputusan politik. OMP dirancang untuk menangani ancaman militer eksternal, sedangkan OMSP dirancang untuk menangani ancaman militer non-agresif dari dalam negeri, serta operasi bantuan dan kemanusiaan. (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia).

Ancaman militer yang berupa agresi nirmiliter dapat berbentuk pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, pemisahan diri bersenjata, sabotase, spionase, tindakan terorisme bersenjata yang disebabkan oleh terorisme internasional atau dalam

koordinasi dengan terorisme domestik aktual yang ada, mengancam keamanan maritim atau penerbangan dalam yurisdiksi nasional dan konflik publik. (Permenhan No. 03 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Deskripsi kualitatif berfokus pada menjawab pertanyaan penelitian terkait siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman hingga akhirnya ditelaah secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul dalam peristiwa tersebut. Dengan kata lain, secara singkat dapat kita jelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada pendekatan kualitatif sederhana pada arus induktif. Garis induksi ini berarti bahwa penelitian deskriptif kualitatif dimulai dengan penjabaran proses atau kejadian yang pada akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan kesimpulan dari proses atau kejadian tersebut (Yuliani, 2018).

Data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan literature review dari buku, artikel, website berita, dan sumber lainnya dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Pada tahun 2020 lalu Papua menjadi kembali memanas. Terjadi tembak menembak antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) disebut juga dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

hingga banyak memakan korban jiwa baik pada kelompok militer ataupun sipil, termasuk tokoh agama. Hingga sekarang, peristiwa yang cukup menarik atensi publik tersebut masih belum jelas asal muasalunya. Belum ada kejelasan soal pihak yang bertanggung jawab atas penembakan itu. Dari pihak TNI maupun TPNPB-OPM, keduanya saling menyalahkan balik mengenai keterkaitannya dalam penembakan masyarakat sipil dan tokoh agama di Papua (Amindoni, 2018). Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan di Papua.

Ridwan Al-Makassary, pegiat Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute, menyatakan bahwasanya perselisihan di wilayah Indonesia yang paling timur ini bukanlah sesuatu yang mudah diselesaikan dalam jangka pendek. Apalagi ketika nasionalis Papua dan pemerintah Indonesia saling tembak untuk memutuskan kebijakannya. Menurut Ridwan Al-Makassary, diperlukan adanya kajian serta perbaikan yang komprehensif mengenai pendekatan keamanan di Papua guna mengurangi konflik. Ridwan juga menuturkan bahwasanya pemerintah perlu lebih menekankan usaha dialog dalam keadaan konflik seperti ini, selain belajar dari kesalahan masa lalu. Semenjak Presiden SBY lalu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, Polri serta TNI didorong menggunakan pendekatan tanpa kekerasan, namun dalam praktiknya terkadang sulit (Ronald, Suci Agiesta, Jackson Mayor, Agil, & Moerti, 2021). Di Papua, kekerasan pada hakekatnya ialah suatu efek kumulatif yang wajib dibenahi dari hulu ke hilir. Biasanya terjadinya penyerangan terhadap warga sipil dipicu oleh KKB yang mencuri amunisi atau menyerang TNI. Hal ini selanjutnya memuncak dengan tembak menembak

antara KKB dengan TNI dan diakhiri dengan penyerbuan atau operasi militer oleh pemerintah Indonesia melalui TNI atau kepolisian.

Sulit untuk menetapkan strategi terjitu dalam menanggulangi persoalan mengenai keamanan di Papua dalam menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan siapapun serta dengan motif apapun (Elisabeth, 2017). Pada buku Papua Road Map yang telah diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2009 menuliskan pangkal permasalahan Papua yakni:

- Peminggiran, diskriminasi, termasuk pengakuan atas kontribusi serta jasa Papua bagi Indonesia yang minim,
- Pembangunan infrastruktur sosial di Papua yang tidak optimal, utamanya kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta keterlibatan yang rendah pelaku ekonomi asli Papua,
- Belum tuntasnya proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya,
- Belum ditanganinya siklus kekerasan politik bahkan meluas,
- Belum bisa menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM, utamanya kasus Wamena, Wasior, serta Paniai.

Di era Orde Baru, penerapan pendekatan keamanan yang digerakkan oleh kebijakan Daerah operasi militer (DOM) tidak memberikan penyelesaian atas perlawanan rakyat Papua yang dimiskinkan oleh kebijakan pusat yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan mengabaikan hak-hak dasar sosial rakyat Papua (Ronald, Suci Agiesta, Jackson Mayor, Agil, & Moerti, 2021). Ditemukan adanya kebijakan politik keamanan dengan pemerintahan pusat yang bertentangan di era Orde Baru. Bertentangan tersebut yakni

berkaitan dengan adanya perusahaan asing yang memiliki kepentingan untuk menggeruk kekayaan alam di Papua. Hingga tahun 1990-an, rakyat Papua dipaksa tunduk pada kepentingan Jakarta yang bercirikan kapitalisme otoriter terpusat. Namun, orang Papua sendiri juga miskin dan tidak memiliki hak untuk memanfaatkan sisa kekayaan alam yang ada. Sehingga menjadikan hidup masyarakatnya berada dalam jerat kemiskinan dengan tidak adanya aturan yang berpihak pada masyarakatnya sendiri.

Jatuhnya kediktatoran Orde Baru kemudian berganti kepemimpinan dengan Presiden ke-3, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pemimpinnya. Gus Dur, juga seorang tokoh aktivis hak asasi manusia sangat memahami hal ini. Perasaan emosional masyarakat Papua saat melakukan tindakan "radikal" terhadap masyarakat Papua. Nama Papua menggantikan nama Irian Jaya yang bernuansa "kolonial" guna memberikan penghormatan pada identitas kolektif mereka yang telah dijajah selama hampir 25 tahun. Gus Dur juga meresmikan berdirinya Majelis Rakyat Papua serta mengizinkan Bendera Bintang Kejora untuk dikibarkan sebagai identitas sosial budaya masyarakat Papua. Gagasan otonomi khusus kemudian diperkenalkan oleh Gus Dur untuk Papua dengan implikasi menyediakan dana khusus yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Papua dan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Gus Dur merupakan sosok pemimpin yang dicintai rakyat Papua dengan pendekatannya yang humanis serta partisipatif. Sayangnya, kebijakan Gus Dur tidak diikuti setahap demi setahap oleh bawahan dan penerus kekuasaannya.

Pendekatan keamanan hingga saat ini masih diberlakukan di Papua (Ronald, Suci Agiesta, Jakson Mayor, Agil, & Moerti, 2021). Pendekatan keamanan

dengan paradigma yang dianggap ancaman oleh masyarakat Papua serta sebagai kekuatan politik untuk kemerdekaan, dianggap sebagai "pembangkok". Implikasi sosiologis dari paradigma keamanan serta "rendahnya" martabat masyarakat Papua adalah:

- Pertama, untuk melakukan penguatan keberadaan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), walaupun mereka melakukan gerakan tersebut tidak untuk kriminal tetapi untuk melakukan perlawanan pada aparatus keamanan negara. Kelompok tersebut bertambah kuat apabila ditekan dengan pendekatan keamanan.
- Kedua, menjunjung tinggi ideologi pro-kemerdekaan Papua yang dianut oleh OPM di luar negeri, serta menjamurnya jaringan gerakan sosial dan mahasiswa anti Jakarta semisal jaringan KNPB dan AMP.
- Ketiga, terdorongnya kondisi pemiskinan kultural dan struktural rakyat Papua, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan Joko Widodo, rupanya mempelajari cara yang dilakukan oleh Gus Dur dengan mencoba melaksanakan hal yang sama dengan pendekatan yang sedikit berbeda seperti capaian pembangunan politik di Papua dan program populis belum sepenuhnya diterima dan menurut masyarakat Papua hasilnya tidak dirasakan oleh mereka. Masyarakat adat serta masyarakat multi suku di pedalaman Papua tidak menyukai kebijakan BBM satu harga. Sebagai pembangunan jalan raya trans

papua tidak mempengaruhi aspek kemanfaatan dasar masyarakat Papua, serta makin merusak lingkungan dan melestarikan hutan. sebenarnya pelayanan pendidikan serta kesehatanlah yang Masyarakat Papua butuhkan yang merupakan bentuk yang paling penting dari pelayanan dasar sosial.

Protes serta reaksi terhadap politik pembangunan di era pemerintahan Joko Widodo Hal ini tercermin dari kelompok bersenjata yang senantiasa “mengganggu” proses pembangunan transportasi, komunikasi dan infrastruktur di Papua. Contohnya adalah pekerja infrastruktur yang dibunuh saat membangun jembatan penghubung di Nduga yang menewaskan 21 orang. Banyak orang Papua justru mendukung kebijakan pembangunan dan non-infrastruktur pemerintah pusat, walaupun banyaknya kekuatan politik anti-Jakarta yang mencoba melakukan sabotase pada kemajuan Papua secara total. Pembangunan dan kebijakan program pro-Papua ditolak mereka dikarena tujuan politik sebenarnya yaitu Papua merdeka, NKRI harus berpisah dengan Papua dan Papua Barat. Penguatan basis gerakan kemerdekaan sebenarnya terjadi di basis pemuda terpelajar Papua yang belajar di berbagai kota di Indonesia. Mengkonsolidasikan akar rumput berarti mengorganisir gerakan mahasiswa yang sudah terkena paham radikalisme. Dengan mudah menempel pada kesadaran ideologis pendidikan politik di asrama mahasiswa Papua. Secara politis, itu wajar; Yang tidak biasa adalah upaya aparat keamanan yang terus-menerus menindas serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku atau gerak-gerik mahasiswa Papua seakan memiliki pemikiran asing.

B. Kesulitan atau Hambatan yang Dihadapi dalam Menangani Konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Penerapan manajemen konflik di Papua tentu tidak berjalan mulus hanya. Banyak dinamika yang berkembang terkait dengan hambatan yang dihadapi penyelesaian konflik di Papua. Demikian dari berbagai sumber yang diperoleh tentang konflik Papua hingga saat ini masih menyisakan suasana kisruh, resah dan tekanan bagi masyarakat Papua. Hal ini menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar selesai. Apa saja hambatan atau kesulitan dalam mencapai solusi untuk mengatasi Konflik di Papua?

1. Faktor Historis

Isu terkait asal muasal budaya Papua berkaitan dengan pandangan para bapak bangsa dan menelusuri sejarah masa lalu sesuatu yang begitu penting untuk memperkuat posisi Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sejarah asal usul budaya adalah simpul penentu pertama dari simpul berikutnya. Jika beberapa orang Papua sesuai yang dijelaskan di paragraf sebelumnya tidak menerima konsep Janggi, berbeda seperti fakta sejarah. Dalam Kakawin Nagarakretagama pupuh XIV oleh Mpu Prapanca, dikatakan bahwasanya Papua adalah salah satu wilayah Kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Setelah keruntuhan Majapahit pada tahun 1478 M dikarenakan invasi Kerajaan Demak, dalam beberapa abad kemudian, Kesultanan Tidore menjadi penguasa atas Papua(Suropati, 2019).

2. Faktor Antropologis

Sebuah kenyataan harus diterima bahwasanya dari segi sosial serta budayanya, masyarakat asli Papua memiliki perbedaan dengan masyarakat Indonesia. Jika rumpun melayu mendominasi masyarakat Indonesia,

berbeda dengan masyarakat Papua yang secara fisik merupakan rumpun Melanesia serta ras Negroid di Pasifik. Begitu pula secara sosial, masyarakat Papua mempunyai prinsip serta cara hidupnya sendiri. Adanya otoritas khas yang dimiliki masyarakat Papua saat mengatur, melakukan pengembangan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan yang didasarkan pada hukum adat bisa memberi beban hak dan kewajiban setiap orang. Karenanya, masyarakat Papua mengalami sedikit kesulitan saat terjadinya benturan budaya dengan yang mayoritas masyarakat Indonesia terapkan.

Secara garis besar, berikut rangkuman faktor antropologis tersebut :

- Ditemukan ideologi serta praktik penjajahan
- Penerapan ideologi pembangunan tersebut hanya ditekankan pada eksploitasi sumber kekayaan alam serta abai terhadap martabat manusia hingga pembangunan kesejahteraan.
- Kekerasan serta eksploitasi oleh kubu militer
- Papua mempunyai tanah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah pula.

3. Faktor Diskriminasi Sistematis (Ketidakadilan)

Orang Papua yang menerima perlakuan tidak adil dalam aspek ekonomi yang mencakup partisipasi masyarakat yang rendah, kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi, kaum pendatang yang mendominasi dalam bidang pemerintahan serta ekonomi, biasanya pengembangan SDM, penindasan budaya, dan kekerasan militer. Terkhusus pada kekerasan militer, wujud militer dalam menindas ialah semisal teror, intimidasi, penyiksaan dan pembunuhan. Biasanya,

pembunuhan dilakukan kepada masyarakat yang militan, memperjuangkan hukum, demokrasi, budaya serta kemanusiaan, termasuk yang menuntut kemerdekaan Papua. Sejalan dengan berbagai macam sumber konflik yang peneliti serta tim peneliti lainnya sudah jelaskan, Penulis berupaya melakukan penarikan simpulan berdasar pada berbagai sumber yang menyatakan adanya permasalahan di Papua, termasuknya melalui penarikan keterkaitan serta relevansinya pada aturan pemerintahan yang memiliki sifat kontemporer.

Menurut penulis, pokok utama terjadinya konflik Papua dikarenakan oleh dua hal, yaitu praktik Pepera 1969 serta proses pembangunan yang berjalan di Papua. Berhubungan dengan Pepera, ditemukan adanya narasi sejarah yang berbeda yang hidup di masyarakat. Narasi dominan yang Pemerintah Indonesia sampaikan ialah status politik tanah Papua sebagai bagian NKRI memiliki sifat yang sah dikarenakan melewati proses resmi serta resolusi PBB. Di pihak yang lain, narasi yang berbeda dimiliki oleh masyarakat Papua. Pepera yang dilaksanakan pada Agustus 1969 ialah tidak sah dikarenakan adanya intimidasi serta kekerasan, dan juga masyarakat Papua menganggap tidak sesuai pelaksanaan New York Agreement 1962. Ditemukan juga perbedaan narasi mengenai proses pembangunan. Di Indonesia, terdapat narasi yang berkembang yang menyebutkan bahwasanya masyarakat Papua berhasil disejahterakan, dicerdaskan, serta diberdayakan lewat proses pembangunan di tanah Papua. Mengacu pada desentralisasi fiskal yang oleh pemerintah pusat lakukan pada daerah Papua lewat dana APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Papua yang mana adalah dana paling tinggi dibanding dengan provinsi-
Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 40 | Desember

2019 57 provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, masyarakat Papua juga mengembangkan narasi tandingan yang menyatakan bahwasanya pembangunan oleh pemerintah Indonesia belum mampu menyejahterakan serta memakmurkan sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Bagi masyarakat Papua, yang berlangsung di tanah Papua ialah eksploitasi SKA, penduduk pribumi yang dimarjinalisasi, lingkungan yang rusak akibat eksploitasi oleh perusahaan asing yang tidak bertanggung jawab, serta bermacam-macam pelanggaran HAM yang mengatasnamakan stabilitas politik serta keamanan.

SIMPULAN

Manajemen konflik Organisasi Papua Merdeka di tanah Papua ditangani secara berbeda-beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua akhirnya belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek – aspek lain. Hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik organisasi Papua merdeka ini dipengaruhi oleh faktor historis, faktor antropologis, faktor diskriminasi sistematis. Menurut kami, ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor – faktor lain.

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk menangani konflik Papua kedepannya, yaitu Perlu ada nya sinergitas dan konsistensi yang terstruktur dengan tepat untuk menangani Konflik Organisasi Papua Merdeka di tanah Papua, Dalam penanganan konflik Organisasi Papua Merdeka, sebelum melakukan Operasi Militer sebaiknya dilakukan diplomasi atau negosiasi antara Pemerintah dan Organisasi Papua Merdeka, dan Upaya resolusi konflik mengacu pada faktor

historis, antropologis dan faktor diskriminasi sistematis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ichsan Malik M.Si dan Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Djayeng Tirto S., SH., M.Si yang membantu peneliti sebagai pembimbing penelitian selama berkuliah di Universitas Pertahanan RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2023). Separatisme: Pengertian – Penyebab dan Contohnya. *haloedukasi.com*, pp. <https://haloedukasi.com/separatisme>.
- Amindoni, A. (2018, Desember 13). Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka? *bbc.com*, pp. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>.
- Aulia Widadio, N., & Nazarudin Latief, M. (2019, November 5). Riwayat konflik Papua, tanah kaya di ujung timur . *Anadolu Agency*, pp. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906>.
- Elisabeth, A. (2017, November 22). Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah. *theconversation.com*, pp. <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>.
- Fatimah. (2019, Oktober 9). Pengertian Gerakan Separatis, Penyebab, Hingga Contohnya di Indonesia. *pelayananpublik.id*, pp. <https://pelayananpublik.id/2019/10/09/pengertian-gerakan-separatis-penyebab-hingga-contohnya-di-indonesia/>.
- PinterPolitik S13. (2020, Februari 4). Sejarah OPM, Juang Merdeka di Tanah Papua. *Pinterpolitik.com*, pp. <https://www.pinterpolitik.com/sejarah/sejarah-opm-juang-merdeka-di-tanah-papua/>.
- Ronald, Suci Agiesta, F., Jakson Mayor, R., Agil, A., & Moerti, W. (2021, September 13). Luka Lama di Tanah Papua. *merdeka.com*, pp.

<https://www.merdeka.com/khas/luka-lama-di-tanah-papua.html>.

Solomat, R. (2015, Juni 24). Latar Belakang Konflik Papua. *Kompasiana.com*, pp. <https://www.kompasiana.com/rimun.solowat/55289030f17e61ba628b45c2/latar-belakang-konflik-papua>.

Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil, dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional*, 47.

Tommy. (2020, Juni 30). Manajemen Konflik: Pengertian, Teori, Tujuan, Proses, Tipe, Strategi dan Manfaat. *kotakpintar.com*, pp. <https://kotakpintar.com/blog/manajemen-konflik/>.

Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA*, 84.